

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi ini, teknologi semakin memiliki peran penting dalam berbagai aspek begitu juga dalam dunia bisnis. Dengan teknologi semua aktivitas yang kita lakukan jadi lebih mudah dan cepat, keuntungan ini yang diharapkan oleh manajemen untuk memperlancar dan membuat kinerja perusahaan lebih baik lagi. Untuk membuat kinerja perusahaan yang baik dibutuhkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, salah satunya yaitu Sistem Informasi Akuntansi.

Menurut Laudon (2010), Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu komponen yang saling bekerja satu sama lain dalam kegiatan mengumpulkan, mengelola, menyimpan, serta menyebarkan beberapa informasi untuk mendukung kegiatan di suatu organisasi, seperti dalam pengambilan Keputusan, dalam mengkoordinasi, mengendalikan serta menganalisis masalah di organisasi tersebut. Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2010:4).

Bodnar dan Hopwood (2012:1) mengatakan Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah/mendesain data keuangan dan data lain ke dalam informasi. Dengan demikian maka Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menangani segala hal mengenai akuntansi. Sistem informasi akuntansi di dala

perusahaan berguna untuk mengumpulkan serta menyimpan data-data yang menyangkut aktivitas keuangan yang terjadi di dalam suatu perusahaan dan juga sebagai suatu informasi terpercaya yang dapat digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil Keputusan demi kemajuan perusahaan atau badan usaha.

Di Indonesia, Badan usaha dibagi menjadi 3 yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Diantara 3 badan usaha tersebut memiliki perbedaan, salah satunya dari sumber modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Dari perbedaan sumber modal tersebut tentunya masing-masing badan usaha memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, **“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.”**

Menurut H.E Erdman (dalam Subandi 2011:18) mengatakan : **“Bahwa Koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan Koperasi.”**

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dalam pembangunan nasional, karena koperasi selain sebagai lembaga ekonomi yang menunjang program pemerintah dalam peningkatan pendapatan juga berperan dalam menciptakan kesempatan kerja terutama di pedesaan.

Tujuan utama koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, manfaat yang diterima anggota lebih utama daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita kerugian. Namun sebagai badan usaha, koperasi harus berorientasi pada efisiensi dan produktivitas yang tinggi serta harus berorientasi pula pada profit dalam rangka memperoleh keuntungan yang cukup meningkatkan pertumbuhan dan menjaga kelangsungan hidup koperasi.

Berdasarkan sektor usahanya, terkait dengan pelayanan kepada anggota, koperasi dibagi menjadi 5 yaitu Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa. Keadaan koperasi di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan, pada dewasa ini kita saling merasakan bahwa suatu koperasi yang ada tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat luas, bahkan masyarakat yang awam mungkin tidak tahu ataupun tidak pernah tahu bagaimana cara memanfaatkan koperasi tersebut.

Pengembangan koperasi dapat dijadikan sebagai sebuah wahana yang efektif bagi anggota untuk saling bekerjasama, membuka akses pasar, modal, informasi, teknologi dengan mengoptimalkan potensi, dan memanfaatkan peluang usaha yang terbuka (Nasution, 2008).

IKOPIN

Tabel 1.1. Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2013 – 2017

Tahun	Koperasi Aktif		Koperasi Tidak Aktif	
	Unit	N/T	Unit	N/T
2013	139.321	-	54.974	-
2014	143.117	2,72%	60.584	10,20%
2015	147.249	2,89%	62.239	2,73%
2016	150.223	2,02%	61.912	-0,53%
2017	152.240	1,34%	62.218	0,49%
Rata-rata N/T	2,24%		3,23%	

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM (2017) diolah

Pada tabel 1.1 jumlah koperasi yang aktif di Indonesia dari tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan, namun terdapat juga peningkatan koperasi yang tidak aktif. Rata-rata peningkatan koperasi yang tidak aktif lebih besar daripada peningkatan koperasi yang aktif. Koperasi yang tidak aktif memiliki kenaikan dengan persentase yang lebih tinggi bahkan dua kali lipatnya dari persentase kenaikan koperasi aktif. Banyaknya koperasi yang tidak aktif dikarenakan koperasi tersebut tidak berhasil melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan rendahnya partisipasi anggota (Jakiyah 2011:104).

Pembentukan koperasi dengan pendekatan *top down* juga menjadi penyebab banyaknya koperasi tidak aktif dan tidak berjalan pada koridornya (Nasution 2008:89). Fungsi proses pembentukan *top down* adalah pembentukan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana, dalam hal ini pemerintah menentukan regulasi atau aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Sedangkan. Fungsi proses pembentukan *bottom up* adalah pembentukan berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan

bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan, atasan berfungsi sebagai fasilitator. Pendekatan *bottom up* merupakan salah satu cara untuk membuat koperasi menjadi aktif. Peranan anggota sebagai pemilik maupun pengguna jasa belum banyak dirasakan. Masyarakat yang bergabung dengan koperasi bukan atas kesadaran sendiri cenderung tidak bisa menyerap nilai-nilai dasar gerakan koperasi secara utuh. Hal ini akan berdampak terhadap rendahnya tingkat kesediaan anggota untuk berpartisipasi secara penuh pada kegiatan koperasi.

Tabel 1.2 Jumlah Koperasi Aktif dan Sudah Berbadan Hukum di Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	No	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi
1	Kab. Bogor	496	15	Kab. Karawang	1480
2	Kab. Sukabumi	1437	16	Kab. Bekasi	497
3	Kab. Cianjur	476	17	Kab. Bandung Barat	361
4	Kab. Bandung	879	18	Kota Bogor	360
5	Kab Garut	1266	19	Kota Sukabumi	309
6	Kab. Tasikmalaya	470	20	Kota Bandung	2390
7	Kab. Ciamis	242	21	Kota Cirebon	284
8	Kab. Kuningan	509	22	Kota Bekasi	633
9	Kab. Cirebon	210	23	Kota Depok	429
10	Kab. Majalengka	374	24	Kota Cimahi	275
11	Kab. Sumedang	527	25	Kota Tasikmalaya	281
12	Kab. Indramayu	777	26	kota Banjar	79
13	Kab. Subang	791	27	kota pangandaran	68
14	Kab. Purwakarta	556	Total		16.456

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM (data diolah)

Kendala lain yang menyebabkan tingginya persentase koperasi yang tidak aktif yaitu bersumber pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Koperasi sebaiknya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang digunakan misalnya dengan pendidikan dan pelatihan (Agung Prihantoro, 2012:59)

Sumberdaya manusia yang dimaksud yaitu pengurus, manajemen, dan anggota koperasi. Kendala tersebut menimbulkan berbagai masalah seperti kekurangmampuan koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha, memperluas skala usaha, pangsa pasar, kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen koperasi, keterbatasan koperasi dalam mengakumulasi permodalan dari anggota, dan keterbatasan koperasi dalam menguasai ilmu dan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatannya.

Jika melihat pesaing koperasi dari usaha sejenis seperti perbankan dan *Mini Market*, keduanya sudah lebih awal menerapkan teknologi dalam kegiatan operasionalnya, apabila koperasi tak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan maka akan semakin tertinggal dari para pesaingnya. Koperasi yang baru memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan daya saingnya ternyata masih rendah. Hanya sebanyak 9.429 koperasi atau sekitar 12% yang sudah memanfaatkannya. (IndoTelko, 2017)

Kemajuan teknologi dan digital mengharuskan setiap pelaku usaha beradaptasi termasuk koperasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dari total jumlah 151.000 koperasi, baru sekitar 10% koperasi yang mengarah dan berbasis IT dalam mekanisme pelaporan ke publik. Beberapa tahun ke belakang merupakan masa transisi beberapa koperasi dari sistem manual menuju sistem otomatis, dalam masa transisi itu selalu ada masalah dan hambatan yang terjadi.

Hal demikian juga dialami oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang, Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps

Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS) merupakan koperasi yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No.75, Regol Wetan, Sumedang Selatan, Kotakulon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat-45362 dengan SK Badan Hukum Nomor 7085/BH/PDD/PAD/KWK.10/III/98 tertanggal 18 Maret 1998. Korps Pegawai Kesehatan Sumedang merupakan koperasi yang usahanya *multi purpose*, artinya ada beberapa unit usaha yang dijalankan bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

Beberapa unit usaha KPRI-KPKS adalah sebagai berikut:

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Perdagangan Umum
3. Unit Percetakan (Fotocopy)
4. Unit Sewa Gedung Seba Guna
5. Unit Penyewaan Alat Pesta

Dengan banyaknya unit usaha di koperasi ini, pengurus berinisiatif membuat suatu sistem informasi berbasis *software* untuk mengintegrasikan beberapa unit usahanya. Selain itu, sistem informasi sangat membantu dalam penyampaian suatu informasi dari Koperasi kepada para anggotanya dan memudahkan aktivitas operasional dalam pengolahan data yang ada di dalam koperasi yang nantinya kembali lagi menjadi informasi untuk dibagikan kepada anggota.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Judhistia P. J. Baramuli dan Herman Karamoy : 2013) menyatakan bahwa sangat penting bagi suatu perusahaan termasuk didalamnya perusahaan properti, untuk menerapkan suatu sistem

informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Terutama dalam masalah keuangan perusahaan. Keuangan merupakan bagian yang vital dalam perusahaan, karenanya pengelolaan keuangan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan, sedangkan menurut (Anneke Wangkar : 2014) menyatakan bahwa beberapa faktor yang berpengaruh pada efektivitas implementasi sistem informasi akuntansi, diantaranya adalah: interaksi *user* dengan sistem informasi akuntansi, *IT support*, keterlibatan konsultan dan *feature* dari sistem informasi akuntansi. Tanpa adanya faktor-faktor diatas, maka sangat kecil kemungkinan perusahaan yang mengimplementasikan sistem informasi akuntansi terintegrasi bisa mengambil keuntungan maksimal dari sistem informasi akuntansi terintegrasi yang diterapkan pada perusahaannya.

Dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 KPRI-KPKS sudah mulai menggunakan *software* keuangan dalam mendukung sistem informasi akuntansi berbasis komputer namun sistem tersebut dinilai belum optimal atau dapat dikatakan sistem yang dijalankan belum berjalan dengan baik, dan ditemukan beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya pemakaian *software* tersebut, diantaranya yaitu :

1. *Software* baru bisa dioperasikan hanya pada satu unit usaha yaitu unit simpan pinjam, itupun belum semuanya tetapi hanya penginputan simpanan;
2. *Software* belum selesai 100%, hal itu dikarenakan pihak Programmer tidak memahami atau kurang memahami tentang Akuntansi ataupun Laporan keuangan;

3. Meskipun sudah menggunakan *Software* berbasis komputer namun beberapa pekerjaan masih dikerjakan secara manual seperti dalam hal penyusunan Laporan Keuangan koperasi.
4. Terdapat perbedaan saldo akhir antara pencatatan secara manual dan pencatatan melalui *software*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka perlu diadakan **“Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di KPRI-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang”**.



IKOPIN

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah di uraikan di bab I, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan di KPRI-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang
2. Bagaimana Desain sistem informasi akuntansi yang seharusnya diterapkan pada KPRI-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud Penelitian

Secara spesifik maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan mengenai Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan di KPRI-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang dengan Sistem Informasi Akuntansi yang baik dan terintegrasi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan di KPRI-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang
2. Desain sistem informasi akuntansi yang seharusnya diterapkan pada KPRI-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan tidak hanya untuk bidang akademik tetapi juga dalam bidang guna laksana, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1.4.1. Aspek Teoritis

Dari data empirik yang didapatkan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian untuk memperluas atau mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan khususnya, selain itu penelitian ini juga berguna untuk ilmu Sistem Informasi Manajemen (SIM) atau lebih tepatnya salah satu bagian dari SIM yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Karena informasi merupakan hal penting yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan atau pengambilan Keputusan.

1.4.2. Aspek Praktis

Bagi KPRI-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang khususnya dan semua koperasi pada umumnya, penelitian ini dapat berguna sebagai pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan sistem informasi berbasis komputer untuk menunjang kinerja tim manajemen dalam koperasi, berkaitan dengan hal itu juga berguna bagi pihak koperasi mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih atau membuat suatu sistem yang terintegrasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi yang sudah diterapkan di koperasi.